



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

KKP
2026

panganbiru

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENGUATAN DAYA SAING PRODUK
KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I
TAHUN 2026



TATA KELOLA
YANG BAIK



KINERJA
BERORIENTASI
HASIL



INTEGRITAS
DAN AKUNTABILITAS



INOVASI DAN
PERBAIKAN BERKELANJUTAN



Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan
yang Efektif dan Akuntabel

Jakarta, April 2026

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Setditjen PDSPKP) Triwulan I Tahun 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi kepada para pemangku kepentingan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan ini memuat capaian kinerja, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang telah direalisasikan oleh Setditjen PDSPKP dalam menjalankan fungsi pelayanan teknis dan administratif. Melalui laporan ini, diharapkan transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi dapat terus ditingkatkan guna mendukung pencapaian peningkatan kinerja Setditjen PDSPKP.

Pada Triwulan I Tahun 2026, kinerja Setditjen PDSPKP ditunjukkan melalui pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,96% yang termasuk dalam kategori “Istimewa”. Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh Tim Kerja Lingkup Setditjen PDSPKP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban yang informatif kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan mandat serta capaian kinerja yang telah ditetapkan serta menjadi landasan untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Seluruh capaian ini dibangun atas dasar internalisasi nilai-nilai organisasi #KITAPDS, yakni Kompetensi, Inovasi-Integritas, Transparansi, dan Akuntabilitas.

Jakarta, 15 April 2026
Sekretaris Ditjen PDSPKP

Machmud

IKHTISAR EKSKLUSIF

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026 Sekretariat Ditjen PDSPKP memiliki 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan. 4 (empat) indikator kinerja kegiatan bersifat triwulanan, 2 (dua) bersifat semesteran, dan 13 (tiga belas) bersifat tahunan.

Sebanyak 19 indikator kinerja tersebut seluruhnya telah dilakukan pengukuran pada Tahun 2026. Hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2026 yang ditunjukkan pada Aplikasi Kinerjaku adalah sebesar 111,96% yang termasuk dalam kategori “Istimewa”.

Pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yang bersifat triwulanan dan seluruhnya telah diukur hingga Triwulan I. Ketiga indikator tersebut menunjukkan capaian optimal, yakni: (1) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP, (2) Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (3) Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Ditjen PDSPKP, (4) Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.
2. Sebanyak 2 (dua) indikator kinerja yang bersifat semesteran yaitu: (1) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Ditjen PDSPKP, (2) Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Ditjen PDSPKP:
3. Terdapat 13 (tiga belas) indikator kinerja yang bersifat tahunan yaitu (1) Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (2) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (3) Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (4) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (5) Nilai

Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (6) Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (7) Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan keputusan Menteri Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, (8) Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (9) Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 Serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (10) Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (11) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (12) Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, (13) Persentase Dokumen Kerja Sama yang disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditektorat jenderal PDSPKP.

4. Alokasi anggaran Sekretariat Ditjen Penguatan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang dikelola (pagu anggaran awal) adalah sebesar Rp109.223.854.000,- (Seratus sembilan miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni dengan realisasi sebesar Rp31.990.207.000,- (Tiga puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh ribu rupiah) setara dengan 29,29% terhadap pagu awal.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSKLUSIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Sumber Daya Manusia.....	5
E. Sistematika Penyajian LKj.....	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2026	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Capaian Kinerja	9
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	13
Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	13
1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen).....	13
2. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen).....	17
3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	18
4. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	20
5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	23
6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	28
7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	30

8. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	34
9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks).....	37
10. Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	40
11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	42
12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	45
13. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	47
14. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	49
15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen).....	51
16. Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan).....	52
17. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	53
18. Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen).....	55
19. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	62
C. Realisasi Anggaran	68
BAB IV PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Permasalahan dan Rekomendasi	69
C. Tindaklanjuti atas Rekomendasi Pada Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025.....	69
LAMPIRAN.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2026	7
Tabel 2.	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2026	10
Tabel 3.	Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP	13
Tabel 4.	Data Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2026	16
Tabel 5.	Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP ..	17
Tabel 6.	Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	19
Tabel 7.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	21
Tabel 8.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	24
Tabel 9.	Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	28
Tabel 10.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	31
Tabel 11.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP	35
Tabel 12.	Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Setditjen PDSPKP	38
Tabel 13.	Ikhtisar pencasspaian Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	40
Tabel 14.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	43
Tabel 15.	Ikhtisar Pencapaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	45
Tabel 16.	Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	47
Tabel 17.	Ikhtisar Pencapaian Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	49
Tabel 18.	Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	51

Tabel 19.	Ikhtisar Pencapaian Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan).....	52
Tabel 20.	Ikhtisar pencapaian Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	54
Tabel 21.	Ikhtisar Pencapaian Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP	56
Tabel 22.	Ikhtisar Pencapaian Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.....	63
Tabel 23.	Rekapitulasi Jumlah Pemberitaan Ditjen PDSPKP Berdasarkan Tone Pemberitaan.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Jumlah Pegawai Setditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2026 ...	5
Gambar 2.	Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2026	5
Gambar 3.	Dashboard NKO pada SAPK Unit Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2026	9
Gambar 4.	Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	14
Gambar 5.	Pembahasan Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal	15
Gambar 6.	Rapat Pemutakhiran data pemanfaatan bantuan pemerintah lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024 dan 2025	20
Gambar 7.	Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi e-ZI versi 2.0.....	22
Gambar 8.	Rapat Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Direktorat Pemberdayaan Usaha dan Direktorat Pemasaran	23
Gambar 9.	Rapat Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan IV tahun anggaran 2025	25
Gambar 10.	Rapat Entry Meeting Reviu Laporan Kinerja (LKj) TA 2025..	26
Gambar 11.	Rapat Rekonsiliasi Kinerja dalam Rangka Persiapan Penilaian SAKIP Tahun 2026	27
Gambar 12.	Capaian Sementara Nilai IKPA Ditjen PDSPKP TW I.....	29
Gambar 13.	Monitoring Capaian IKPA pada Pengisian Capaian Output TW I 2026.....	29
Gambar 14.	Rapat Koordinasi Persiapan Sosialisasi Bantuan Pemerintah (BP) Tahun 2026	32
Gambar 15.	Rapat Koordinasi pembahasan dukungan Ditjen PDSPKP terhadap Program Prioritas Presiden RI Tahun 2026.....	33
Gambar 16.	Rapat Pembahasan Usulan Pemanfaatan Anggaran pada RO Khusus	34
Gambar 17.	Kegiatan persiapan pembinaan SPIP tahun 2026 oleh tim BPKP	37
Gambar 18.	Rapat Monitoring dan Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai Triwulan IV	39
Gambar 19.	Rapat Rekonsiliasi Data Kepegawaian dan Implementasi DNS-SIASN lingkup Ditjen PDSPKP	39

Gambar 20.	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan	42
Gambar 21.	Rapat Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021	44
Gambar 22.	Rapat pemutakhiran rencana umum pengadaan barang/jasa dan monitoring pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PDSPKP	46
Gambar 23.	Rapat Identifikasi SOP di Direktorat Pemasaran	48
Gambar 24.	Rapat Identifikasi SOP di Lingkungan Ditjen PDSPKP	48
Gambar 25.	Rapat Pemantauan dan Evaluasi Inovasi Pelayanan Publik	50
Gambar 26.	Rapat Pembahasan Persiapan Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2026	50
Gambar 27.	Rapat Pembahasan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Tahun 2025	52
Gambar 28.	Pendampingan hukum untuk memenuhi pemanggilan dari Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya	55
Gambar 29.	SCM Hibah GQSP UNIDO	57
Gambar 30.	Monev Lapang Proyek Hibah GQSP UNIDO di Kabupaten Gunung Kidul	59
Gambar 31.	Monev Lapang Proyek Hibah GQSP UNIDO di Kabupaten Karawang	59
Gambar 32.	Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan PT. Penanaman Nasional Madani	60
Gambar 33.	Rapat Koordinasi dengan Deputi Bidang Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	61
Gambar 34.	Rapat Pembahasan PKS antara KKP dan POLRI	62
Gambar 35.	Penyebaran Narasi Positif secara Masif di Media Sosial	64
Gambar 36.	Pembuatan dan Penyebaran Siaran Pers	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Setditjen PDSPKP Tahun 2026	70
--	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan pelaksanaan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan. Dalam menjalankan tugas tersebut, Sekretariat Ditjen PDSPKP tidak hanya berfungsi sebagai penopang administratif, tetapi juga berperan strategis dalam memastikan keterpaduan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal. Salah satunya mendukung kebijakan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan diarahkan untuk mewujudkan produk kelautan dan perikanan yang memiliki daya saing tinggi sehingga dapat bersaing baik di pasar domestik maupun internasional. Kebijakan dimaksud mengacu pada pendekatan *market driven* di mana kebutuhan dan preferensi pasar menjadi dasar dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memenuhi standar yang dibutuhkan pasar, sehingga lebih mudah diterima dan diminati oleh konsumen. Untuk menjawab tantangan tersebut, produk kelautan dan perikanan dituntut memiliki karakteristik unggul, yakni berkualitas tinggi (*high quality*), aman untuk dikonsumsi (*safe*), dapat ditelusuri asal-usulnya (*traceable*), memiliki nilai tambah yang tinggi (*high value content*), serta kompetitif di pasar (*competitive*). Pelaksanaan kebijakan ini dirancang secara berkelanjutan, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang, guna memastikan konsistensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan strategis sektor kelautan dan perikanan.

Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Nomor 94 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan strategis Ditjen PDSPKP yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahunan. Mengacu pada dokumen Renstra tersebut, setiap unit kerja lingkup Ditjen PDSPKP membuat perencanaan tahunan guna mencapai

indikator sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan program yang termuat dalam Renstra. Perencanaan tersebut dibuat dengan disertai indikator sasaran dan cara mencapai sasaran tersebut secara strategis.

Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Ditjen PDSPKP sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun dokumen perencanaan kinerja, pengukuran capaian kinerja, pengelolaan data capaian kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban.

Dokumen Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan baik berdasarkan renstra maupun rencana kinerja tahunan yang dibuat sebelumnya. Dokumen ini menjadi sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini akan menginformasikan capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 atas pelaksanaan sasaran program dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Triwulan I Tahun 2026 disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada pihak pemberi mandat. Melalui laporan ini, dirumuskan kesimpulan serta rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dan referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada periode selanjutnya, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja organisasi.

C. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, kedudukan Ditjen PDSPKP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan. Dalam kedudukannya, Ditjen PDSPKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing dan sistem logistik produk kelautan dan perikanan, serta peningkatan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Sekretariat Ditjen PDSPKP menyelenggarakan fungsi:

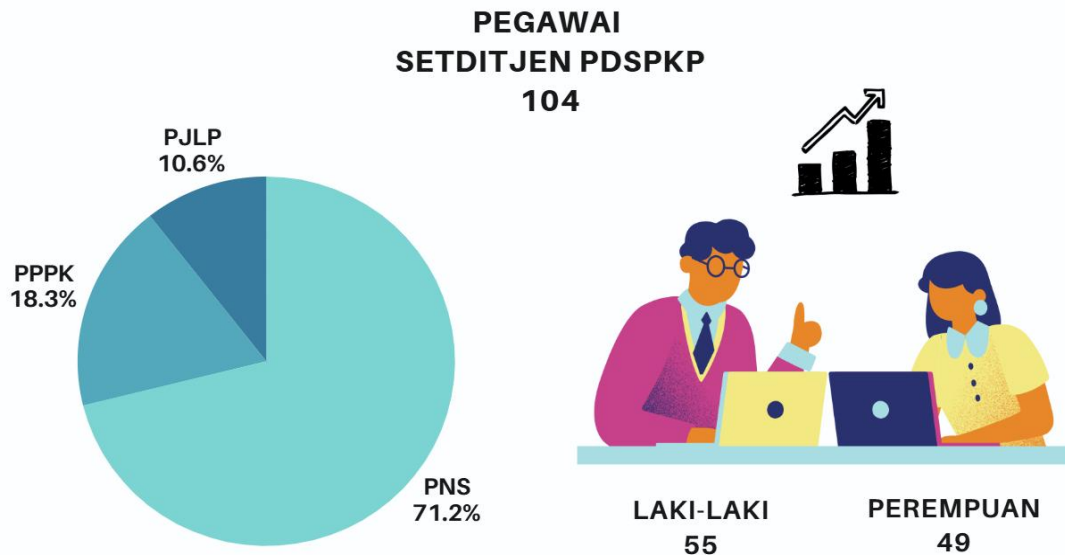
1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;

7. Koordinasi pengelolaan persuratan dan kearsipan serta rumah tangga dan perlengkapan pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
9. Koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan; dan
10. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan, serta Nota Dinas Sekretariat Ditjen PDSPKP Nomor 3635/DJPDSKP.1/RSDM.210/IX/2025 tanggal 25 September 2025 perihal Penyampaian Surat Tugas Ketua Tim Kerja lingkup Ditjen PDSPKP, adapun Tim Kerja lingkup Setditjen PDSPKP sebagai berikut:

1. Tim Kerja Program;
2. Tim Kerja Sumber Daya Manusia Aparatur;
3. Tim Kerja Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi;
4. Tim Kerja Hukum;
5. Tim Kerja Kerjasama dan Hubungan Masyarakat;
6. Tim Kerja Data dan Layanan Publik;
7. Tim Kerja Keuangan;
8. Tim Kerja Pengendalian Risiko dan Pengadaan Barang/Jasa;
9. Kepala Bagian Umum.

D. Sumber Daya Manusia



Gambar 1. Jumlah Pegawai Setditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2026

E. Sistematika Penyajian LKj

Laporan kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar 2 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Tahun 2026

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 ditujukan untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029. Pada RPJMN, Visi Indonesia Emas 2045 dibagi dalam beberapa tahapan yang dilakukan secara terukur dan konsisten. Tahap pertama (tahun 2025- 2029), difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Tahap kedua (tahun 2030-2034), melakukan akselerasi untuk mewujudkan transformasi yang sudah diperkuat fondasinya. Selanjutnya pada tahap ketiga (tahun 2035-2039), Indonesia memulai langkah untuk melakukan ekspansi global. Kemudian pada tahap terakhir RPJMN (tahun 2040-2045), Indonesia diharapkan dapat mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yaitu “Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”.

Untuk tahap penguatan fondasi transformasi tahun 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rencana strategis tahun 2025-2029 menetapkan visi: “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sebagai bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berperan dalam mendukung arah kebijakan nasional, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan berkomitmen untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden serta Visi KKP. Pada tahap penguatan transformasi tahun 2025-2029, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Nomor 94 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan Tahun 2025 – 2029 dalam rangka

mendukung dua dari lima agenda transformasi yang didukung KKP, yaitu: (a) transformasi ekonomi, dan (b) ketahanan sosial budaya dan ekologi

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Perjanjian Kinerja berisi tentang pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP pada tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2026

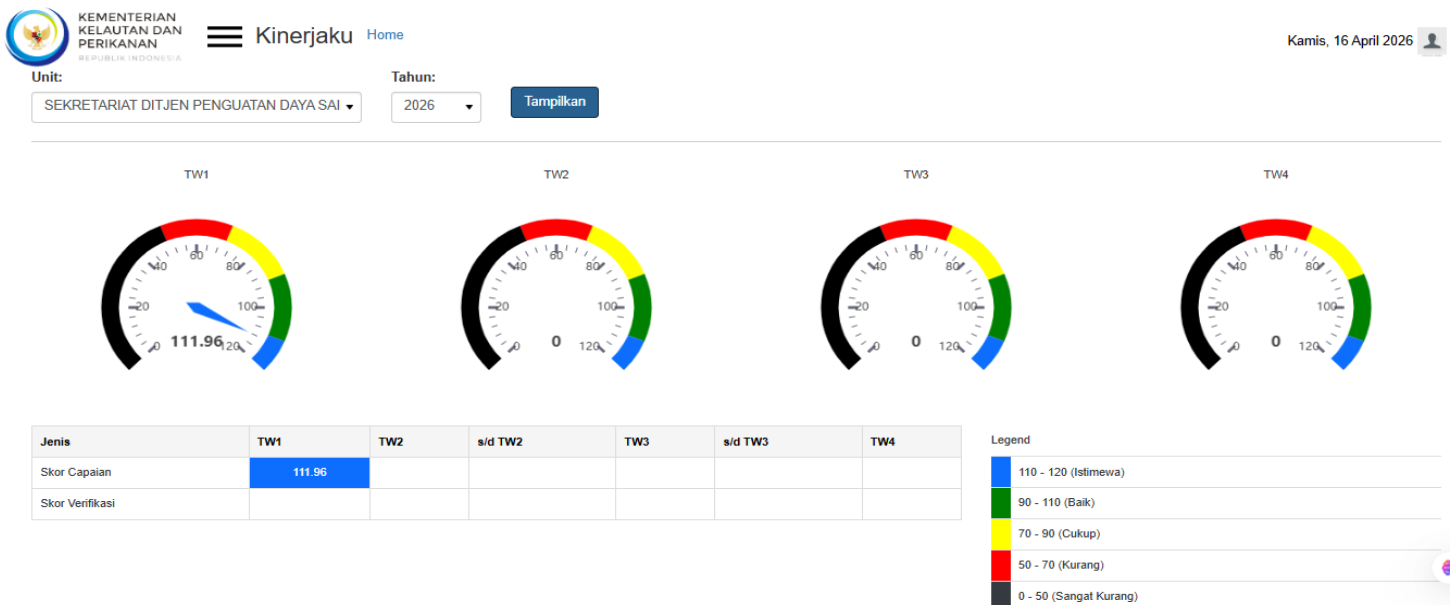
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	86
		2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	≤0,5
		3.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	82
		4.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	77
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	86,2
		6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	92,1
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	81,75
		8.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	3,6

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		9.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)	81,5
		10.	Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	100
		11.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	81
		12.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	77
		13.	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	85
		14.	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	78
		15.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	92
		16.	Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)	12
		17.	Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	100
		18.	Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)	80
		19.	Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	≤5

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada tahun 2026, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah menetapkan 1 (satu) Sasaran Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Kegiatan. 4 (empat) indikator kinerja kegiatan bersifat triwulanan, 2 (dua) bersifat semesteran, dan 13 (tiga belas) bersifat tahunan. Berdasarkan hasil pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Setditjen PDSPKP pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 111,96% yang termasuk dalam kategori “Istimewa”. NKO tersebut merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan yang bisa diperoleh dari Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK). Dashboard NKO pada SAPK Unit Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana Gambar 3.



Gambar 3. Dashboard NKO pada SAPK Unit Kerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi TW I 2026	% Terhadap Target TW I 2026	% Terhadap Target 2026
		Tahun 2026	TW I 2026			
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	86	86	89,29	103,83	103,83
	2. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	≤0,5	-	-	-	-
	3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	82	-	-	-	-
	4. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	77	-	-	-	-
	5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	86,2	-	-	-	-
	6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	92,1	-	-	-	-
	7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	81,75	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi TW I 2026	% Terhadap Target TW I 2026	% Terhadap Target 2026
		Tahun 2026	TW I 2026			
	8. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	3,6	-	-	-	-
	9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)	81,5	-	-	-	-
	10. Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	100	-	-	-	-
	11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	81	-	-	-	-
	12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	77	77	99,99	129,857143	1,29857143
	13. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	85	-	-	-	-
	14. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	78	-	-	-	-
	15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	92	-	-	-	-

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		Realisasi TW I 2026	% Terhadap Target TW I 2026	% Terhadap Target 2026
		Tahun 2026	TW I 2026			
	16. Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)	12	3	3	100	25
	17. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	100	-	-	-	-
	18. Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)	80	-	-	-	-
	19. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	≤5	≤5	1	120	120

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja menjelaskan realisasi indikator kinerja, permasalahan dan kendala yang dihadapi serta upaya perbaikan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Sekretariat Ditjen PDSPKP. Analisis untuk setiap sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja di lingkungan Setditjen PDSPKP didefinisikan sebagai jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu, Evaluasi dan Pemantauan) yang terbit pada LHP-nya pada periode 1 Oktober 2025 s.d 31 Maret 2026 (Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan I Tahun 2026) dan telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh unit eselon II sampai dengan 31 Maret 2026 (Triwulan I Tahun 2026).

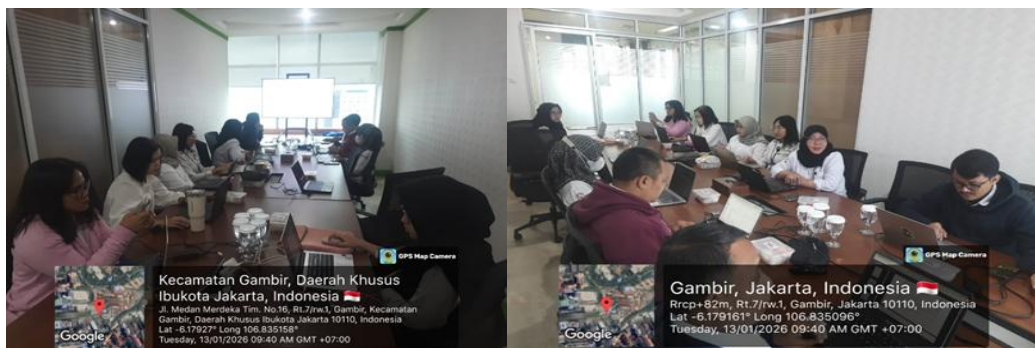
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	S.d TW I Tahun 2026			TW IV 2025	TW I 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP	86	85	85	86	89,29	98,68	85	89,29	103,83	103,83	-9,52	5,05

Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 89,29. Capaian ini setara dengan 103,83% terhadap target Triwulan I Tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 86, serta 103,83% terhadap target Tahun 2026 sebesar 86. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya (TW IV 2025) sebesar 98,68, maka capaian Triwulan I Tahun 2026 mengalami penurunan sebesar 9,52%. Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya (TW I 2025) sebesar 85, maka terdapat peningkatan capaian sebesar 5,05%.

Dalam mendukung pencapaian target indikator kinerja Triwulan I Tahun 2026 Sekretariat Ditjen PDSPKP telah mengadakan pembahasan guna menindaklanjuti atas laporan hasil pemeriksaan beserta dengan tindak lanjut yang sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Jenderal. Hal ini bertujuan agar dokumen tersebut dapat diterima oleh tim Inspektorat Jenderal dan dinyatakan tuntas. Pelaksanaan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja antara lain:

- a. Melaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut hasil reviu pengendalian intern pelaporan keuangan (PIPK) PDSPKP tahun 2025 pada tanggal 13 Januari 2026 yang diikuti oleh tim inspektorat IV KKP dan dihadiri oleh seluruh tim PIPK unit eselon II lingkup Ditjen PDSPKP. Dalam pelaksanaan kegiatan Ditjen PDSPKP menindaklanjuti hasil reviu dengan melengkapi dokumen PIPK pada Tabel A1, Tabel B, Tabel B1, Tabel B2, Tabel C.1, Tabel D dan Tabel E pada level UAKPA dan UAPPA-E1



Gambar 4. Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)

- b. Keikutsertaan dalam rapat ekspose rencana kegiatan TA 2026 pada tanggal 19 Januari 2026 dan dipimpin oleh Inspektur IV KKP, Perwakilan Pejabat Eselon II lingkup PDSPKP serta perwakilan unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP. Dalam pelaksanaan kegiatan disampaikan hasil pengawasan lingkup Ditjen PDSPKP, serta pemaparan terkait capaian kinerja TA. 2025 dan rencana kegiatan/anggaran Ditjen PDSPKP TA.2026.
- c. Melaksanakan kegiatan pembahasan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan inspektorat jenderal pada tanggal 4 Maret 2026 yang diikuti oleh Auditor Inspektorat IV KKP, Perwakilan unit eselon II lingkup Ditjen PDSPKP, serta perwakilan Tim Kerja lingkup Setditjen PDSPKP. Dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan pembahasan terkait laporan hasil pemeriksaan beserta dokumen tindak lanjut sesuai hasil rekomendasi. Hal ini bertujuan penyelesaian dokumen tindak lanjut hasil rekomendasi dapat terselesaikan dengan status tuntas pada aplikasi <https://sidak.kkp.go.id>.



Gambar 5. Pembahasan Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Jenderal

Tabel 4. Data Rekapitulasi Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2026

No	Unit Kerja	Jumlah Rekom	Tindak Lanjut (Tuntas)	Tuntas (%)	Sisa Rekom	Sisa Rekom (%)
1	Setditjen PDSPKP	13	11	84,62	2	15,38
2	Direktorat Prasarana dan Sarana	0	0	100	0	0
3	Direktorat Pemberdayaan Usaha	6	6	100	0	0
4	Direktorat Pengolahan	4	3	99,40	1	0,60
5	Direktorat Pemasaran	5	5	100	0	0
5	Direktorat Akses dan Promosi	0	0	100	0	0
6	BBP3KP	0	0	100	0	0
TOTAL		28	25	89,29	3	10,71

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode Triwulan I Tahun 2026 lingkup Ditjen PDSPKP sebesar 89,29% atau sebanyak 25 rekomendasi dan 28 rekomendasi dinyatakan Tuntas.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 20.396.000,- sampai dengan Bulan Maret 2026 dari pagu Rp63.098.000,- atau setara dengan 32%.

2. Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas Laporan Keuangan (LK) Lingkup Ditjen PDSPKP merupakan jumlah nilai temuan keuangan terbatas pada nilai tuntutan ganti rugi Unit Eselon I atas hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Ditjen PDSPKP Tahun 2026 dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PDSPKP tahun 2026.

Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	S.d TW I Tahun 2026			TW IV 2025	TW I 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	-	-	-	≤0,5	-	-	-	-	-	-	-	-

Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2026 ditargetkan <0,5. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2026. Sifat polarisasi indikator kinerja ini adalah *minimize* atau semakin kecil maka kinerjanya semakin baik

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain :

- Melaksanakan kegiatan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban;
- Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN periode Semester II Tahun 2025 (Unaudited) Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 12 - 15 Januari 2026. Output kegiatan ini yaitu penyelesaian Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara periode Semester II Tahun 2025 (*Unaudited*) ;

- c. Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan dan BMN periode Januari dan Februari Lingkup Ditjen PDSPKP pada tanggal 10 Maret 2026. Output kegiatan ini yaitu penyelesaian transaksi *to do list* dan penutupan periode Januari dan Februari pada aplikasi sakti dan *myintress*;
- d. Melakukan pemenuhan dokumen pemeriksaan oleh tim BPK RI perihal Pemeriksaan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 114.434.000,- sampai dengan Bulan Maret 2026 dari pagu Rp190.267.000,- atau setara dengan 60%.

3. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis merupakan ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan dari KKP kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang dikategorikan prioritas/strategis antara lain memenuhi kriteria berikut :

- a. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat;
- b. Memiliki anggaran besar;
- c. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP;
- d. Mendukung pencapaian prioritas nasional;
- e. Merupakan arahan direktif presiden;
- f. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

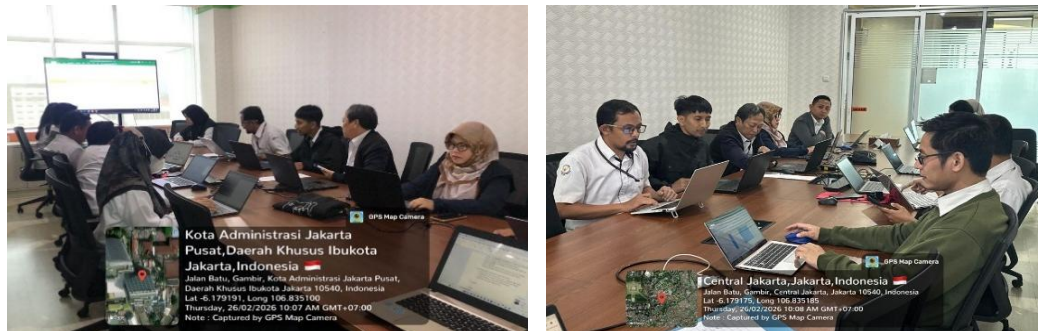
Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	S.d TW I Tahun 2026			TW IV 2025	TW I 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	-	-	-	82	-	-			-	-	-	-

Indikator Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP ditargetkan 82. Penghitungan pencapaian indikator ini dilaksanakan tahunan dimana penilaian dilakukan di akhir triwulan IV.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Sekretariat Ditjen PDSPKP melaksanakan kegiatan :

1. Rapat Pemutakhiran data pemanfaatan bantuan pemerintah lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024 dan 2025 dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2026.

Bantuan pemerintah pada tahun 2025 terdiri dari 406 unit chest freezer, 5870 unit cool box, 35 unit peralatan pengolahan, 1 unit ice flake machine, dan 1 unit pasar ikan. Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang diperoleh dari unit kerja penanggung jawab bantuan pemerintah diketahui secara umum bantuan pemerintah tahun 2025 telah beroperasi, kecuali bantuan pemerintah berdampak bencana alam Sumatera yang perlu diidentifikasi lebih lanjut. Bantuan pemerintah pada tahun 2024 terdiri dari 311 unit chestfreezer, 10 unit gudang beku portable, 5533 unit coolbox, 10 unit kendaraan berpendingin, 10 unit pabrik es, 1 unit revitalisasi pasar ikan, 165 peralatan pengolahan, 17 unit sarana pasca panen, dan 1 Unit Pengolahan Ikan.



Gambar 6. Rapat Pemutakhiran data pemanfaatan bantuan pemerintah lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024 dan 2025

2. Rapat Pemantauan perkembangan pengisian pelaporan bantuan pemerintah lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2024 dan 2025 pada Aplikasi Satu Data Bantuan Pemerintah dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2026.

Dalam rangka rapat Perkembangan Pengisian Pelaporan Bantuan Pemerintah Lingkup Tahun 2024 dan 2025 pada Aplikasi Satu Data Bantuan Pemerintah. Pemantauan program prioritas dan anggaran oleh pimpinan saat ini melalui dashboard yang ada pada aplikasi <https://bp.kkp.go.id>. Bantuan pemerintah lingkup KKP yang terekap pada dashboard adalah bantuan 2021-2025 dan saat ini tahun Bantuan Pemerintah tahun 2026 belum terpantau pada dashboard. Ditjen PDSPKP saat ini terdata pada dashboard telah menyalurkan bantuan pemerintah sebesar Rp11.008.929.000.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 16.973,- sampai dengan Bulan Maret 2026 dari pagu Rp72.120.000,- atau setara dengan 24%.

4. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan fokus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	S.d TW I Tahun 2026			TW IV 2025	TW I 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	-

Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2026 ditargetkan 77. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2026.

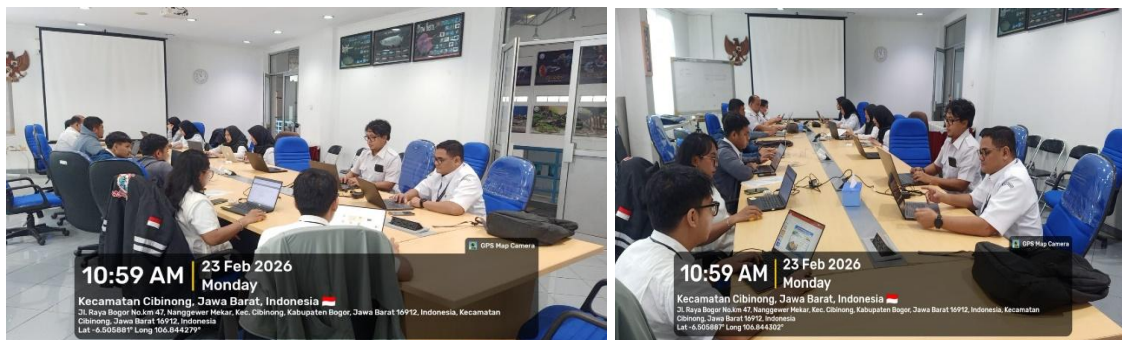
Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- Pelaksanaan Apel Pagi dan Briefing Reformasi Birokrasi setiap hari senin yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP;
- Penanganan Pengaduan lingkup Ditjen PDSPKP Bulan Januari, Februari, dan Maret 2026 dan konsultasi/pengaduan yang diterima selain melalui SP4N LAPOR! telah seluruhnya diinput pada aplikasi SP4N LAPOR! dengan status tuntas. Laporan penanganan pengaduan juga telah disampaikan kepada Inspektorat V selaku Tim Penanganan Pengaduan Kementerian secara berjenjang;
- Pembentukan Tim Pelaksana Pengelola Konflik Kepentingan Ditjen PDSPKP Tahun 2026 melalui penerbitan Keputusan Dirjen PDSPKP Nomor 5 Tahun 2026;
- Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Ditjen PDSPKP melalui penerbitan Keputusan Dirjen PDSPKP Nomor 6 Tahun 2026;
- Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Ditjen PDSPKP melalui penerbitan Keputusan Dirjen PDSPKP Nomor 7 Tahun 2026;
- Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Ditjen PDSPKP melalui penerbitan Keputusan Dirjen PDSPKP Nomor 9 Tahun 2026;

- g. Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2026 melalui Surat Tugas Nomor B.1453/DJPDSPKP.1/KP.440/II/2026 tanggal 5 Februari 2026;
- h. Mengikuti kegiatan FGD Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KKP pada 28 Januari 2026;
- i. Mengikuti Rapat Pengisian Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) KKP Triwulan IV Tahun 2025 pada 28 Januari 2026;
- j. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi e-ZI versi 2.0 dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada 19 Februari 2026;
- k. Rapat Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Direktorat Pemberdayaan Usaha dan Direktorat Pemasaran pada tanggal 23 Februari 2026;
- l. Menerbitkan Surat Edaran Nomor B.694/DJPDSPKP/HK.170/III/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi terkait Momen Hari Raya di Lingkungan Ditjen PDSPKP Tahun 2026 pada tanggal 5 Maret 2026.



Gambar 7. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi e-ZI versi 2.0



Gambar 8. Rapat Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Direktorat Pemberdayaan Usaha dan Direktorat Pemasaran

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 23.659.050,- sampai dengan Bulan Maret 2026 dari pagu Rp 64.598.000- atau setara dengan 37%.

5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Nilai PMSAKIP merupakan penilaian mandiri oleh Itjen KKP terhadap penerapan SAKIP pada instansi pemerintah yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada penerapan *outcome* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Nilai PM SAKIP Lingkup Ditjen PDSPKP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Ditjen PDSPKP merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Ditjen PDSPKP.

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	S.d TW I Tahun 2026			TW IV 2025	TW I 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-		86,2	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2026 ditargetkan 86,2. Indikator Nilai Penilaian Mandiri AKIP bersifat tahunan sehingga capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2026.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

1. Rapat Pengisian Evaluasi Rencana Aksi Level 1 dan 2 Lingkup Ditjen PDSPKP Periode Triwulan IV Tahun 2025 dilaksanakan tanggal 6 Januari 2026.

Kegiatan evaluasi dilaksanakan melalui pengisian capaian Rencana Aksi Level 1 dan Level 2 oleh masing-masing unit kerja sesuai tanggung jawabnya. Selanjutnya dilakukan pembahasan dan klarifikasi atas hasil pengisian untuk memastikan kesesuaian antara rencana, pelaksanaan, dan capaian yang dilaporkan. Hasil evaluasi setiap unit kerja direkapitulasi dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum dalam dokumen Excel hasil kegiatan, yang memuat informasi capaian, permasalahan, tindak lanjut, rekomendasi, serta keterangan pendukung.

2. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan IV tahun anggaran 2025 dilaksanakan tanggal 8 Januari 2026.

Rapat ini diselenggarakan untuk membahas implementasi informasi kinerja pasca penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru serta penyesuaian Indikator Kinerja. Fokus utama rapat meliputi pengisian capaian Triwulan IV (TW IV) pada aplikasi Kinerjaku,

penyelesaian kendala data dukung, serta pemutakhiran indikator kinerja akibat perubahan PK.



Gambar 9. Rapat Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Lingkup Ditjen PDSPKP periode triwulan IV tahun anggaran 2025

3. Rapat penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKJ) Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Level 1 dan Level 2 dilaksanakan tanggal 12 Januari 2026.

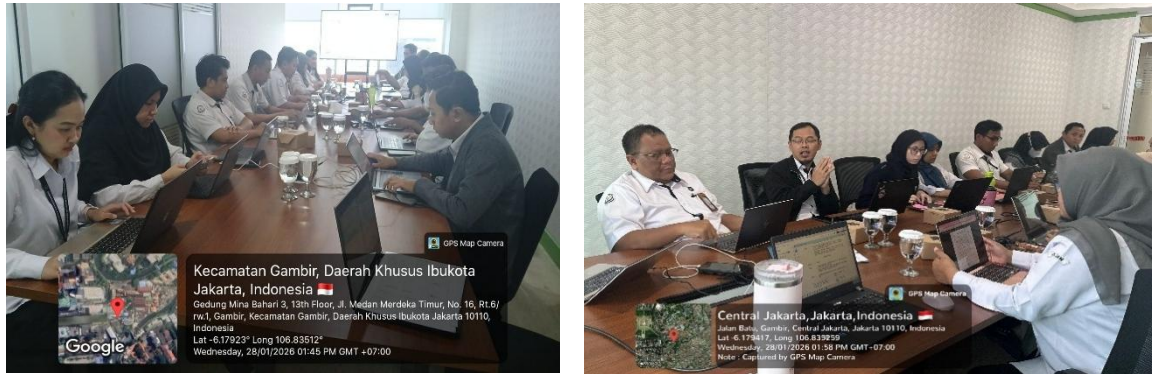
Pembahasan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan substansi laporan dengan prinsip akuntabilitas kinerja, keterpaduan narasi antarlevel, serta pemenuhan aspek pengarusutamaan gender dalam pelaporan kinerja. Pembahasan dilakukan terhadap progres penyusunan LKJ Level 1 dan Level 2. Untuk LKJ Level 2, sebagian besar data dan informasi telah tersedia, dan beberapa bagian ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat tanggal 21. Penyusunan LKJ Level 1 ditargetkan selesai pada minggu kedua bulan Februari, dengan mempertimbangkan kebutuhan konsolidasi dan penyelarasan narasi kinerja.

4. Rapat Verifikasi Capaian Kinerja pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2026.

Pembahasan ini bertujuan untuk memverifikasi capaian kinerja dengan data dukung seperti keterangan, kesesuaian IKU, target dalam Aplikasi KinerjaKu.

5. Rapat *Entry Meeting Reviu* Laporan Kinerja (LKj) TA 2025 Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2026.

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyamakan persepsi antara Sekretariat Ditjen PDSPKP dan Inspektorat IV terkait pelaksanaan reviu Laporan Kinerja (LKj) Tahun Anggaran 2025, penyampaian ruang lingkup reviu, serta memastikan kesiapan dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses evaluasi kinerja.



Gambar 10. Rapat Entry Meeting Reviu Laporan Kinerja (LKj) TA 2025

6. Rapat Pembahasan Hasil Reviu Laporan Kinerja (LKj) Level I Tahun 2025 Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dilaksanakan tanggal 6 Februari 2026.

Dokumen LKj Level I Tahun 2025 Ditjen PDSPKP perlu dilakukan penyempurnaan terkait data dukung, konsistensi narasi, serta kesesuaian antara target dan realisasi indikator kinerja. Diperlukan koreksi data realisasi indikator nilai pemasaran produk perikanan dalam negeri serta penambahan analisis perbandingan antar tahun. Draft laporan akan diselaraskan dengan CHR dan dilengkapi sebagai lampiran laporan LKj. Proses reviu LKj Level I dan Renstra masih menunggu formalisasi dan persetujuan pimpinan.

7. Rapat Rekonsiliasi Kinerja dalam Rangka Persiapan Penilaian SAKIP Tahun 2026 dilaksanakan tanggal 10 Maret 2026.

Kegiatan rekonsiliasi kinerja dilaksanakan selama dua hari dengan pembagian unit kerja sebagai berikut: Hari pertama meliputi:

- Direktorat Pemasaran
- Direktorat Akses dan Promosi
- Unit Balai

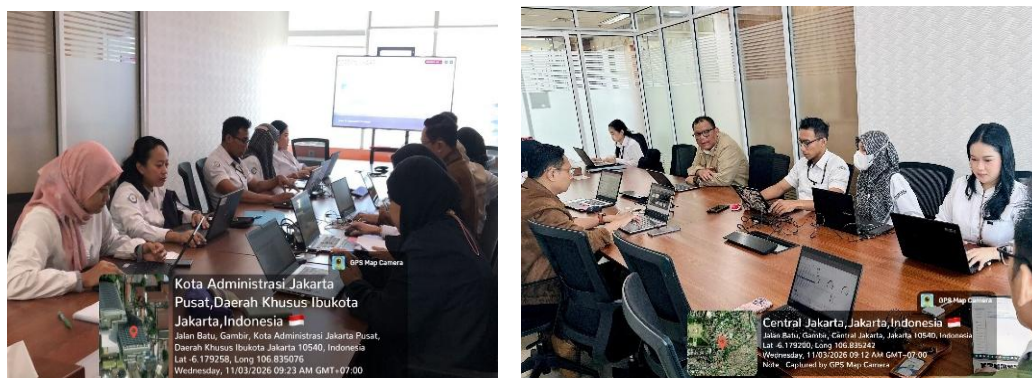
Arahan Ketua Tim Kerja Pogram Setditjen PDSPKP menyampaikan bahwa kegiatan rekonsiliasi ini sangat penting untuk memastikan seluruh dokumen kinerja telah tersusun secara lengkap dan konsisten, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan.

Seluruh unit kerja diminta untuk membawa dokumen kinerja secara lengkap guna memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan dan pelaporan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Ditjen PDSPKP sehingga peringkat penilaian SAKIP dapat meningkat dari posisi sebelumnya menuju lima besar nasional.

8. Rapat Rekonsiliasi Kinerja dalam Rangka Persiapan Penilaian SAKIP Tahun 2026 dilaksanakan tanggal 11 maret 2026.

Kegiatan rekonsiliasi kinerja ini merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen PDSPKP.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh unit kerja dapat melakukan perbaikan terhadap dokumen kinerja sehingga proses penilaian SAKIP tahun 2026 dapat berjalan dengan baik serta meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Gambar 11. Rapat Rekonsiliasi Kinerja dalam Rangka Persiapan Penilaian SAKIP Tahun 2026

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp17.530.000,- sampai dengan Bulan Maret 2026 dari pagu Rp 185.911.000,- atau setara dengan 9%.

6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Indikator kinerja ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Tabel 9. Ikhtisar Pencapaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	S.d TW I Tahun 2026			TW IV 2025	TW I 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)				92,1								

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2026 ditargetkan 92,1. Indikator ini bersifat tahunan sehingga penghitungannya akan dilakukan pada akhir tahun 2025.

Dalam rangka optimalisasi capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Ditjen Jenderal PDSPKP pada periode Triwulan I Tahun 2026, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan kegiatan dan berkoordinasi dengan seluruh Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen PDSPKP antara lain:

- Melaksanakan monitoring capaian IKPA terhadap progres pengisian Capaian Output periode Maret 2026 dengan Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian kelautan dan Perikanan. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Aplikasi OMSPAN per tanggal 31 Maret 2026 data capaian IKPA Ditjen PDSPKP periode Maret 2026 sebesar 67,83.

NO	PERIODE	KODE	NAMA	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN		NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANGAN)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
					REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	NILAI ASPEK	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	NILAI ASPEK	CAPAIAN OUTPUT	NILAI ASPEK				
1	03 Maret	03206	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	64,16 20 12,83	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	91,04	0,00 25 0,00	0,00	67,83	100,00%	0,00	67,83

Gambar 12. Capaian Sementara Nilai IKPA Ditjen PDSPKP TW I

Data capaian output periode Maret 2026 per tanggal 31 Maret 2026 sebesar 67,83% dari target capaian sebesar 100%. Hasil monitoring capaian output yang masih belum dimasukkan sampai dengan akhir bulan Maret 2026. Pada tahun anggaran 2026, pelaksanaan penilaian IKPA Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan penilaiannya hanya pada satker lingkup Pusat dan UPT saja, karena kebijakan penganggaran.

NO	KODE KANWIL	KODE KPPN	KODE ESELON 1	KODE SATKER	NAMA SATKER	DIPA REVISI KE-	JUMLAH OUTPUT DIPA	KONFIRMASI CAPAIAN OUTPUT			VALIDASI CAPAIAN OUTPUT			% DATA MASUK/UPLOAD	JUMLAH KIRIMAN DATA SAKTI	DIPA REVISI KE- (SAKTI)	TANGGAL PERTAMA KIRIM SAKTI	TERAKHIR POSTING OMSPAN	AKSI	PERIODE UPLOAD DATA
								TERKONFIRMASI	TIDAK TERKONFIRMASI	JUMLAH	DATA VALID	DATA TIDAK VALID	JUMLAH							
1	KT1	175	03206	622131	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	4	46	0	0	0	0	0	0	0,00					detail	Open
2	KT1	175	03206	427686	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN (BBP3KP)	4	12	0	0	0	0	0	0	0,00					detail	Open
Total							58	0	0	0	0	0	0	0,00						

Gambar 13. Monitoring Capaian IKPA pada Pengisian Capaian Output TW I 2026

b. Keikutsertaan dalam rapat Monitoring Pelaksanaan IKPA Periode Maret Tahun 2026 di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan oleh Biro Keuangan dan BMN, KKP pada tanggal 9 April 2026. Adapun laporan pelaksanaan kegiatan tersebut, sebagai berikut:

- 1) Adanya efisiensi anggaran sesuai dengan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 2) Penetapan target pada Rencana Kerja KKP tahun 2026 sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 83 Tahun 2025

Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025.

- 3) Adapun indikator penghitungan capaian IKPA sebagai berikut:
- a) Capaian Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran sebesar 100%, dengan indikator capaian atas revisi anggaran sebesar 100% dan capaian indikator Deivi Halaman III DIPA sebesar 100%.
 - b) Capaian Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 100%, dengan indikator capaian atas penyerapan anggaran sebesar 100%, belanja kontraktual 100%, penyelesaian tagihan sebesar 100%, pengelolaan UP dan TUP sebesar 100%, capaian output sebesar 00,00%.
 - c) Dispensasi SPM (Pengurang) sebesar 0,00%.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp13.778.870.000,- sampai dengan Bulan Maret 2026 dari pagu Rp68.273.538.000- atau setara dengan 22%.

7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran yang diukur berdasarkan Efektivitas Penggunaan Anggaran dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Unit Eselon I. Data kinerja perencanaan anggaran diperoleh dari Sistem Informasi dan dilanjutkan dengan perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan atas perencanaan anggaran Kementerian/Lembaga melalui aplikasi MONEV Kemenkeu berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dihitung berdasarkan variabel

Efektivitas dan variabel Efisiensi dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori NKPA dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKPA > 90;
2. Baik, apabila NKPA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKPA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKPA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKPA = 50.

Tabel 10. Ikhtisar Pencapaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	S.d TW I Tahun 2026			TW IV 2025	TW I 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-		81,75	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2026 ditargetkan 81,75. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2026.

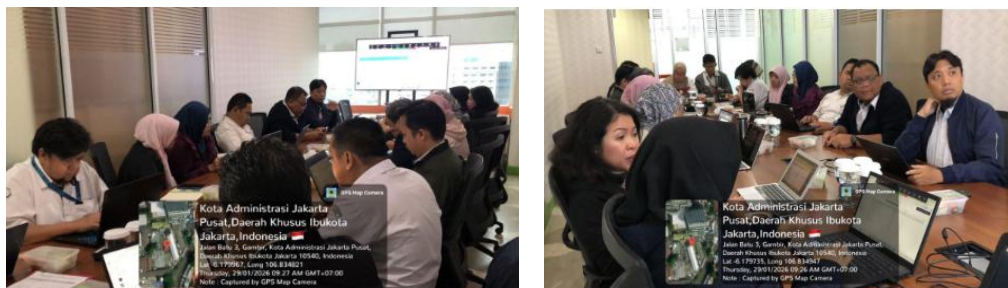
Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada periode Triwulan I guna pencapaian indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Ditjen PDSPKP antara lain:

1. Rapat Penginputan Usulan Revisi Buka Blokir Anggaran Tahun 2026 pada Aplikasi SAKTI dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2026.

Revisi Administrasi berupa pengesahan, antara lain penghapusan tanda blokir berupa penyampaian kekurangan dokumen dasar yang dipersyaratkan dalam pengalokasian anggaran pada Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Satker Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp38.880.051.000.

Alasan/pertimbangan perlunya revisi anggaran:

- a. Antisipasi terhadap perubahan kondisi dan prioritas kebutuhan, mempercepat pencapaian kinerja kementerian/Lembaga, meningkatkan efektivitas dan kualitas belanja, optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas;
 - b. Telah dilengkapi dokumen pendukung untuk kegiatan-kegiatan yang diusulkan.
2. Rapat Pembahasan kegiatan anggaran pemberdayaan masyarakat (aspirasi), kegiatan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2026.
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat (aspirasi) antara lain: (1) Bimbingan Teknis Kewirausahaan (2) Bimbingan Teknis Diversifikasi Produk (3) Bimbingan Teknis Pemasaran (4) Inkubasi Bisnis (5) Kampanye Gemarikan (6) Coolbox (7) Chest Freezer (8) Peralatan Pengolahan. Masing-masing penanggungjawab kegiatan memaparkan rancangan anggaran belanja (RAB) pada setiap kegiatan dengan tujuan yang sama. Setiap kegiatan disusun petunjuk teknis yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Rincian anggaran belanja (RAB) dan Petunjuk Teknis yang diharapkan dapat disusun segera, sehingga apabila dari Biro Perencanaan sudah menjadwalkan pelaksanaan sosialisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat para penanggung jawab kegiatan dapat mensosialisasikan kegiatan tersebut kepada Tenaga Ahli (TA) DPR.
3. Rapat Koordinasi Persiapan Sosialisasi Bantuan Pemerintah (BP) Tahun 2026 kepada Tenaga Ahli Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2026.



Gambar 14. Rapat Koordinasi Persiapan Sosialisasi Bantuan Pemerintah (BP) Tahun 2026

4. Rapat Koordinasi pembahasan dukungan Ditjen PDSPKP terhadap Program Prioritas Presiden RI Tahun 2026, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2026.



Gambar 15. Rapat Koordinasi pembahasan dukungan Ditjen PDSPKP terhadap Program Prioritas Presiden RI Tahun 2026

5. Rapat Pembahasan Revisi Anggaran Kewenangan KPA, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2026.

Dalam rangka perencanaan program dan anggaran tahun 2026 lingkup Ditjen PDSPKP, Setditjen PDSPKP melaksanakan Rapat Usulan Revisi Anggaran Kewenangan KPA dilaksanakan pada Kamis, 5 Maret pukul 09.00 di Ruang Rapat Sekretariat Ditjen PDSPKP, Lantai 14, GMB III KKP. Rapat ini dihadiri oleh Koordinator Program unit kerja Eselon II lingkup Ditjen PDSPKP dan perwakilan tim kerja lingkup Setditjen PDSPKP.

6. Rapat Pembahasan Usulan Pemanfaatan Anggaran pada RO Khusus, kegiatan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2026.

Pemanfaatan alokasi pada RO Khusus hanya dapat dilakukan setelah terdapat Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga yang paling sedikit memuat: (a) Dasar penetapan kegiatan yang akan dilaksanakan berupa arahan/instruksi Presiden (arahan/instruksi Presiden berdasarkan hasil konfirmasi kepada Menteri Sekretaris Negara); (b) Penanggungjawab dan mekanisme pelaksanaan kegiatan; (c) Jumlah alokasi dana dan output kegiatan yang akan dilaksanakan; (d) Pemenuhan persyaratan alokasi anggaran (antara lain KAK, RAB, Rekomendasi teknis; clearance/persetujuan teknis dari unit terkait; Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN); Dasar penentuan lokus kegiatan; dan Hasil reviu APIP); (e) Ketentuan laporan perkembangan fisik dan keuangan. Setiap perwakilan Eselon II lingkup

Ditjen PDSPKP memaparkan Usulan Pemanfaatan Anggaran pada RO Khusus, antara lain untuk Operasionalisasi KNMP, Dukungan terhadap Budidaya Tematik (operasional bioflok), rencana pemulihan bencana di Sumatera terhadap pelaku usaha di bidang pengolahan dan pemasaran yang terdampak bencana Sumatera.



Gambar 16. Rapat Pembahasan Usulan Pemanfaatan Anggaran pada RO Khusus

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp2.569.000,- sampai dengan Bulan Maret 2026 dari pagu Rp172.255.000- atau setara dengan 1%.

8. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP serta mewujudkan budaya pengendalian intern (internal control culture) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian.

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Tabel 11. Ikhtisar Pencapaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	S.d TW I Tahun 2026			TW IV 2025	TW I 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-	-	3,6	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Ditjen PDSPKP pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 3,6 Indikator kinerja ini bersifat tahunan dan akan dihitung pada akhir tahun 2026, sehingga capaiannya belum bisa diketahui pada Triwulan I tahun 2026. Setditjen PDSPKP telah melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- Melaksanakan kegiatan monitoring input data pelaksanaan kegiatan SPIP pada bulan desember 2025 melalui aplikasi SILASTI pada tanggal 9 Januari 2026 dan penyusunan laporan SPIP bulan Triwulan IV Tahun 2025. Pelaksanaan kegiatan bertujuan untuk menyelesaikan pelaporan pelaksanaan kegiatan SPIP periode bulan desember 2025 lingkup Ditjen PDSPKP, selain itu tersusunya laporan SPIP Ditjen PDSPKP periode

triwulan IV tahun 2025. Dalam penyusunan laporan SPIP harus memuat kegiatan/aktivitas pengendalian yang telah dilakukan selama triwulan IV, yaitu: pengendalian rutin terhadap kegiatan organisasi, perencanaan, keuangan negara, kepegawaian dan kinerja.

- b. Mengikuti kegiatan pembahasan rencana kerja pengendalian internal lingkup Sekretariat Jenderal dan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2026 pada tanggal 8 Januari 2026 yang diselenggarakan oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN, serta diikuti oleh perwakilan unit kerja Eselon I lingkup KKP. Dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan pembahasan terkait evaluasi pelaksanaan kegiatan SPIP pada tahun 2025 dan rencana kerja di tahun 2026 dilingkungan kementerian kelautan dan perikanan, dan pada pelaksanaan kegiatan di tahun 2026 KKP berencana akan melakukan studi banding dengan Kementerian/Lembaga lainnya yang sudah menerapkan pelaksanaan kegiatan pengendalian internal dan PIPK melalui sistem aplikasi.
- c. Mengikuti kegiatan reviu penilaian pengendalian intern atas pelaporan keuangan (PIPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2025 pada tanggal 2 s.d 4 Februari 2026, yang diselenggarakan oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN, dan diikuti oleh tim reviu PIPK Inspektorat V KKP, serta tim penilaian PIPK tingkat eselon I KKP. Dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan pembahasan mekanisme penilaian PIPK dan kelengkapan dokumen pendukung PIPK di masing – masing unit kerja eselon I. hasil pelaksanaan kegiatan disampaikan, bahwa penilaian intern atas pelaporan keuangan entitas pelaporan Eselon I Ditjen PDSPKP adalah Efektif. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan adalah memadai.
- d. Keikutsertaan pada rapat persiapan pembinaan SPIP tahun 2026 oleh tim BPKP, sesuai dengan surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan, Nomor PE.09.01/SP-63/D3/3/2026 hal pengembangan informasi awal dan pembinaan SPIP tahun 2026. Kegiatan dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan dan BMN pada tanggal 10 Febrauri 2026, dan diikuti oleh tim

permbina SPIP BPKP, serta tim SPIP unit Eselon I Lingkup KKP. Dalam pelaksanaan rapat tim PIPK unit eselon I diminta untuk mengisi kertas kerja terkait uraian ringkas isu strategis, sumber tautan, analisis urgensi pemenuhan kriteria isu strategis, justifikasi urgensi, analisis masalah (5W1H), dan aksi yang telah dilaksanakan.



Gambar 17. Kegiatan persiapan pembinaan SPIP tahun 2026 oleh tim BPKP

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.360.000,- sampai dengan Bulan Maret 2026 dari pagu Rp22.871.000- atau setara dengan 6%.

9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018).

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- a. Kualifikasi dengan bobot 25% yang dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang di update pada aplikasi SIASN BKN dan Portal KKP;

- b. Kompetensi dengan bobot 40% yang diolah datanya dari aplikasi MyASN BKN dan E-Pegawai KKP berdasarkan Penghitungan nilai diklat struktural dan fungsional;
- c. Kinerja dengan bobot 30% berdasarkan hasil penilaian Kinerja Pegawai pada Aplikasi Kinerja Pegawai BKN pada aplikasi E-Pegawai KKP, dan
- d. Disiplin dengan bobot 5% diolah datanya dari aplikasi E-Pegawai KKP dengan ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 5 tahun terakhir dan di update pada aplikasi Portal KKP

Tabel 12. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Setditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	S.d TW I Tahun 2026			TW IV 2025	TW I 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)				81,5								

Capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Setditjen PDSPKP tahun 2026 ditargetkan 81,5. Penghitungan pencapaian indikator ini dilaksanakan pada setiap semester dan penilaian akan dilakukan pada semester I dan pada semester II tahun berjalan.

Setditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indeks profesionalitas ASN lingkup Setditjen PDSPKP antara lain:

- a. Rapat Monitoring dan Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai Triwulan IV Tahun 2025, 19 Januari 2026;
- b. Rapat Persiapan Penyusunan Rumusan Ruang Lingkup Tugas Jabatan Fungsional Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, 26 Januari 2026;
- c. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal PDSPKP, 30 Januari dan 9 Maret 2026;

- d. Rapat Tindak Lanjut Pengembangan Kompetensi ASN melalui *Corporate University* bidang PDSKP, 6 Februari 2026;
- e. Rapat Pembahasan Final Perumusan Ruang Lingkup Tugas Jabatan Fungsional Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, 10 Februari 2026;
- f. Rapat Sosialisasi dan Pembinaan Jabatan Fungsional Non Bidang Kelautan dan Perikanan, 26 Februari 2026;
- g. Rapat Rekonsiliasi Data Kepegawaian dan Impementasi DNS-SIASN lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP, 12 Maret 2026.



Gambar 18. Rapat Monitoring dan Evaluasi Disiplin dan Kinerja Pegawai
Triwulan IV



Gambar 19. Rapat Rekonsiliasi Data Kepegawaian dan Impementasi
DNS-SIASN lingkup Ditjen PDSPKP

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp50.308.000,- sampai dengan Bulan Maret 2026 dari pagu Rp357.912.000- atau setara dengan 30%.

10. Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, peraturan menteri dan keputusan menteri yang akan disusun Ditjen PDSPKP tahun 2026 meliputi:

- a. Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan; dan
- b. Rancangan Keputusan Menteri tentang Pedoman Penghitungan Konsumsi Ikan Masyarakat.

Tabel 13. Ikhtisar pencapaian Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)

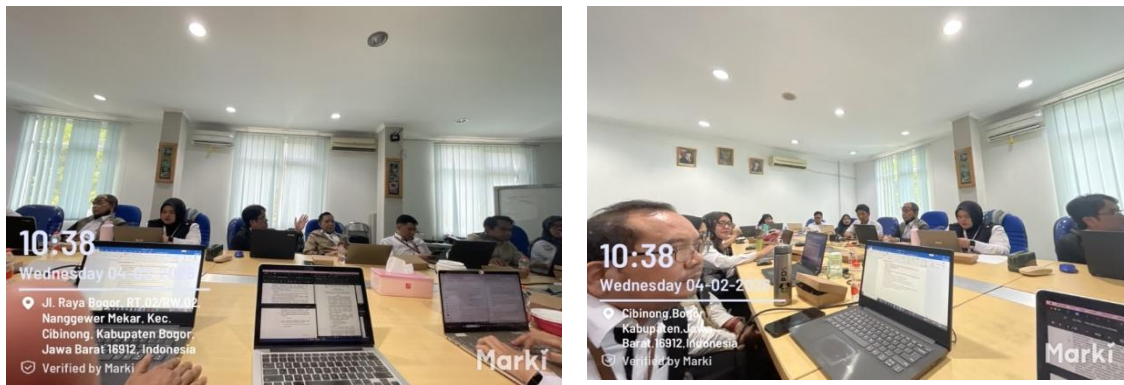
Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	S.d TW I Tahun 2026			TW IV 2025	TW I 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tahun 2026 ditargetkan 100. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2026.

Capaian diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Hukum dan HAM atau penyampaian penetapan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Menteri) hingga 31 Desember 2026, dibandingkan dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2026.

Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan dan Rancangan Keputusan Menteri tentang Pedoman Penghitungan Konsumsi Ikan Masyarakat ditargetkan untuk disampaikan ke Sekretaris Jenderal pada bulan Juni 2026 dan selesai pada bulan September 2026.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan telah dilakukan pembahasan berdasarkan Undangan Direktur Pemasaran Nomor B.504/DJPDSPKP.5/TU.330/II/2026. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2026 di Raiser Ikan Hias Cibinong Bogor Jawa Barat, dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Substitusi Impor dan dihadiri oleh perwakilan Biro Hukum, Pusat Data dan Informasi, Direktorat Sarana dan Prasarana Ditjen Perikanan Budi Daya, unit eselon II lingkup Ditjen PDSPKP, dan BBP3KP. Direktorat Pemasaran akan menyempurnakan hasil pembahasan draft Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Neraca Komoditas Perikanan sesuai kesepakatan rapat.



Gambar 20. Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan

Dalam penyusunan Rancangan Keputusan Menteri tentang Pedoman Penghitungan Konsumsi Ikan Masyarakat, telah dilakukan dua kali pembahasan, di antaranya:

1. Rapat berdasarkan undangan Direktorat Pemasaran Nomor B.958/DJPDSPKP.5/TU.330/II/2026 yang dilaksanakan tanggal 27 Februari 2026 di Ruang Rapat I, GMB III lantai 15, dipimpin oleh Katimja Pemetaan dan Analisis Pasar dalam Negeri, dan dihadiri oleh perwakilan Tim Kerja Hukum PDSPKP dan Direktorat Pemasaran; dan
2. Rapat berdasarkan undangan Direktorat Pemasaran Nomor B.1060/DJPDSPKP.5/TU.330/III/2026 yang dilaksanakan 5 Maret 2026 di Ruang Rapat Direktorat Pemasaran, GMB III lantai 12A, dipimpin oleh perwakilan timja Direktorat Pemasaran, dan dihadiri oleh perwakilan Tim Kerja Hukum PDSPKP dan Direktorat Pemasaran.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp75.617.000,- sampai dengan Bulan Maret 2026 dari pagu Rp159.768.000- atau setara dengan 47%.

11. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara, pemerintah daerah, dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha

penyelamatan secara terpadu, sistematis dan komprehensif sehingga diperlukan pengawasan kearsipan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan.

Kegiatan Pengawasan Kearsipan Internal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2026 yaitu dilakukannya verifikasi terhadap dokumen data dukung pengawasan oleh Tim Penilai Pengawasan Kearsipan KKP Tahun 2026. Tahun 2026 target nilai pengawasan kearsipan di lingkungan Ditjen PDSPKP sebesar 81.

Tabel 14. Ikhtisar Pencapaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	S.d TW I Tahun 2026			TW IV 2025	TW I 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-		81	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2026 ditargetkan 81. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2025.

Adapun upaya yang telah dilakukan Setditjen PDSPKP untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan kearsipan pada Triwulan I Tahun 2026 antara lain:

- Rapat Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan . Rapat dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2026 bertempat di Ruang Rapat II Lantai 15 GMB III. Rapat dipimpin oleh Kepala Bagian Umum, dan dihadiri oleh Arsiparis Biro Umum, Arsiparis dan pengelola arsip lingkup Ditjen PDSPKP.



Gambar 21. Rapat Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2021

- b. Melaksanakan Kegiatan Penyusutan Arsip Lingkup Ditjen PDSPKP pada Tanggal 28 – 30 Januari 2026, yang dihadiri oleh Kepala Bagian Umum, Arsiparis Setditjen PDSPKP, Direktorat Pemberdayaan Usaha dan Direktorat Pemasaran. Kegiatan penyusutan arsip yang dilaksanakan terhadap 266 Box Arsip yang belum diarsipkan 8 rak yang berisikan arsip dari Direktorat Pemberdayaan Usaha dan 8 rak arsip Direktorat Pemasaran yang belum diinput, 8 rak.
- c. Kegiatan pemberkasan dan penyusutan arsip usul musnah ini dilaksanakan oleh Arsiparis dan pengelola arsip Sekretariat Ditjen PDSPKP pada Tanggal 20 Februari 2026, Arsip usul musnah adalah daftar arsip yang diusulkan untuk dimusnahkan karena sudah tidak memiliki nilai guna, telah habis masa retensinya, dan sesuai dengan jadwal retensi arsip (JRA). Pemusnahan arsip dilakukan untuk efisiensi pengelolaan arsip dan menjaga kerahasiaan informasi .
- d. Melaksanakan Penyusutan Arsip lingkup Ditjen PDSPKP pada 17 Boks Arsip yang akan menjadi daftar arsip usul musnah, arsip usul musnah terdiri dari Arsip Substantif (Arsip Pokok) dan Arsip Fasilitatif (Arsip Pendukung) dari masing-masing eselon II lingkup Ditjen PDSPKP periode tahun 2009-2021, pada Tanggal 5 – 6 Maret 2026,

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp42.932.000,- sampai dengan Bulan Maret 2026 dari pagu Rp110.738.000- atau setara dengan 39%.

12. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Tabel 15. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	S.d TW I Tahun 2026			TW IV 2025	TW I 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	77	76	-	77	99,99	100	-	99,99	129,86	129,86	-0,01	-

Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) lingkup Ditjen PDSPKP pada Triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 99,99% atau setara dengan 129,86% baik dari target triwulan I maupun target tahun

2026. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan IV tahun 2025 maka capaian Triwulan I tahun 2026 penurunan sebesar 0,01. Capaian Triwulan I tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya karena tidak ada pengukuran indikator ini pada periode tersebut.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Rapat pemutakhiran rencana umum pengadaan barang/jasa dan monitoring pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PDSPKP.

Rapat dilaksanakan pada tanggal 29-30 Januari 2026. Rapat dihadiri oleh Perwakilan Biro Perencanaan, Setjen KKP, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setjen KKP, dan unit kerja eselon II lingkup Ditjen PDSPKP.

Berdasarkan RKAKL Satker Setditjen PDSPKP total pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp.248.538.288.000 (dua ratus empat puluh delapan miliar lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah dengan komposisi Non penyedia sebesar Rp. 71,37 miliar (28,72%) dan penyedia sebesar Rp. 177,17 miliar (71,28%).



Gambar 22. Rapat pemutakhiran rencana umum pengadaan barang/jasa dan monitoring pengadaan barang/jasa lingkup Ditjen PDSPKP

- b. Evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun 2025 dan monitoring progres pengadaan Barang/Jasa tahun 2026 Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Direktorat Jenderal PDSPKP melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2026 yang diselenggarakan pada tanggal 5 s.d. 6 Maret 2026 di Raiser Ikan Hias Cibinong, Kabupaten Bogor. Rapat dihadiri oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa, Setjen KKP dan unit kerja eselon II Lingkup Ditjen PDSPKP.

- c. Pemutakhiran RUP PBJ Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2026. Kegiatan pemutakhiran RUP PBJ Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Rencana Umum Pengadaan (RUP) Lingkup Ditjen PDSPKP Triwulan I 2026, dilaksanakan di Ruang Rapat Karaginan GMB III KKP tanggal 13 Maret 2026. Berdasarkan dashboard aplikasi SIRUP Belanja Pengadaan Satker Sekretariat Ditjen PDSPKP Tahun 2026 sebesar 180,33 miliar dan terumumkan sebesar 151,43 miliar atau 83,97%

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp60.005.000,- sampai dengan Bulan Maret 2026 dari pagu Rp115.295.000- atau setara dengan 52%.

13. Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Probis KKP terdiri atas: Probis Level 0; Probis Level 1; Probis Level 2; Probis Level 3. SProbis Level 0 dan Level 1 telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Proses Bisnis di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Penyusunan SOP berdasarkan Probis Level 3.

Tabel 16. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	S.d TW I Tahun 2026			TW IV 2025	TW I 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	-	-	-	85	-	-	-	-	-	-	-	-

Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2026 ditargetkan 85. Indikator kinerja ini

merupakan indikator kinerja yang bersifat tahunan, dan capaiannya akan diukur pada akhir tahun 2025. Indikator ini juga merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Menghadiri rapat Identifikasi Standar Operasional Prosedur Direktorat Pemasaran pada tanggal 13 Februari 2026;
- b. Rapat Identifikasi Standar Operasional Prosedur pasca SOTK baru di lingkungan Ditjen PDSPKP pada tanggal 26 Februari 2026.



Gambar 23. Rapat Identifikasi SOP di Direktorat Pemasaran



Gambar 24. Rapat Identifikasi SOP di Lingkungan Ditjen PDSPKP

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp27.198.000,- sampai dengan Bulan Maret 2026 dari pagu Rp162.934.000,- atau setara dengan 17%.

14. Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Berdasarkan Pedoman Menteri PAN RB No. 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025 Berdasarkan Efisiensi Anggaran, Kriteria inovasi mencakup: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, mudah disebarkan, dan berkelanjutan. Klasifikasi inovasi mencakup: Kelompok Umum dan Kelompok Khusus. Untuk semua pelayanan yang dilakukan Unit Pelayanan Publik (UPP) lingkup Ditjen PDSPKP masuk ke dalam kelompok umum. Untuk pedoman penyelenggaraan KIPP Tahun 2026 belum diterbitkan.

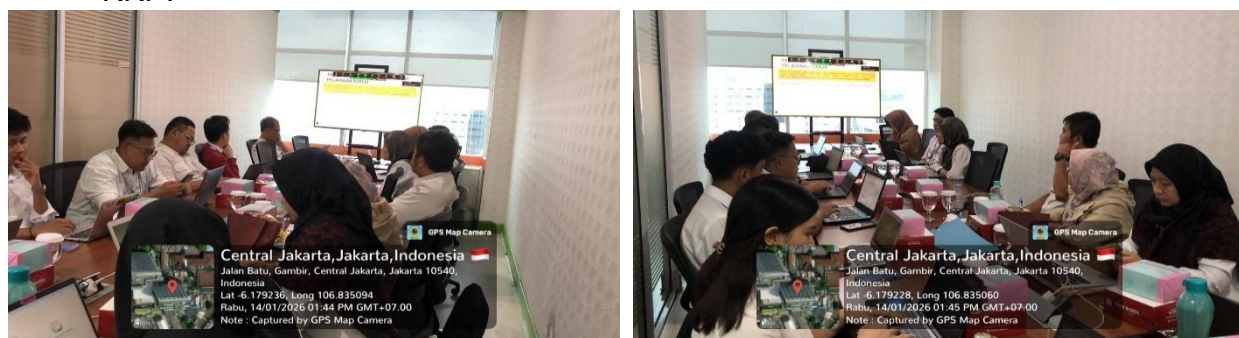
Tabel 17. Ikhtisar Pencapaian Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	S.d TW I Tahun 2026			TW IV 2025	TW I 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	-	-	-	78	-	-	-	-	-	-	-	-

Target Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2026 adalah 78. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2026.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen PDSPKP dalam rangka mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain:

- Rapat Pemantauan dan Evaluasi Inovasi Pelayanan Publik, 14 Januari 2026;
- Rapat Pembahasan Persiapan Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2026;
- Menyampaikan usulan anggota Tim Penilai Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan KKP Tahun 2026 kepada Kepala Pusat Data dan Informasi KKP.



Gambar 25, Rapat Pemantauan dan Evaluasi Inovasi Pelayanan Publik



Gambar 26. Rapat Pembahasan Persiapan Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2026

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 42.092.000,- sampai dengan Bulan Maret 2026 dari pagu Rp 283.560.000,- atau setara dengan 15%.

15. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Tingkat kepatuhan pengelolaan data kelautan dan perikanan adalah penilaian terhadap pencapaian kepatuhan dalam pengelolaan satu data KKP yang dihitung mulai level Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelaporan data ke Unit Teknis yang ada di KKP sampai dengan Validasi Nasional. Data diambil dari pengisian kuesioner secara sampling, yang diisi oleh petugas Pengelola Data kelautan dan perikanan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah pelaku usaha yang telah teregister pada tahun sebelumnya. Untuk menentukan parameter termasuk kedalam kategori tidak patuh, cukup patuh, patuh dan sangat patuh terdapat 3 Variabel Perhitungan, yaitu:

- Persentase Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi (X1), Bobot Nilai 30%.
- Persentase Data Produksi KP yang Tervalidasi (X2), Bobot Nilai 40%.
- Persentase Realisasi Data Geospasial yang Terintegrasi (X3), Bobot Nilai 30%.

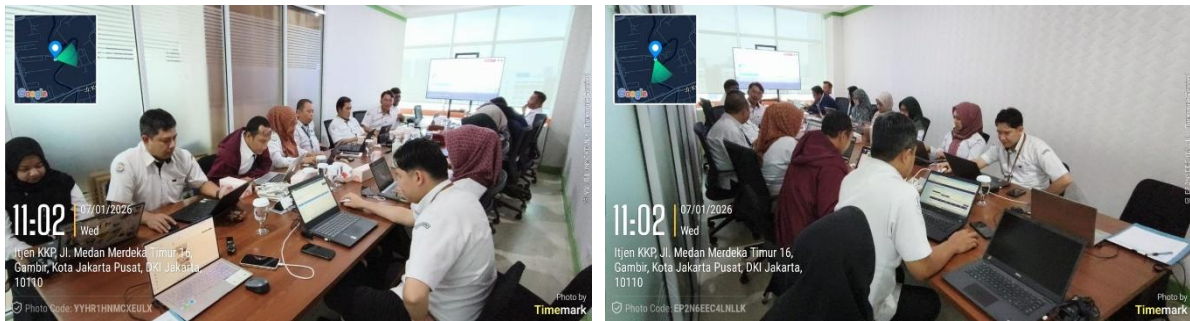
Tabel 18. Ikhtisar Pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	S.d TW I Tahun 2026			TW IV 2025	TW I 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	-	-	-	92	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP tahun 2026 ditargetkan 92. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2026.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen PDSPKP dalam rangka mendukung pencapaian Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP antara lain:

- a. Rapat Pembahasan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Tahun 2025, 7 Januari 2026;
- b. Menyampaikan usulan Tim Validator Pusat Satu Data KKP Tahun 2026.



Gambar 27. Rapat Pembahasan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 10.608.000,- sampai dengan Bulan Maret 2026 dari pagu Rp 61.160.000,- atau setara dengan 17%.

16. Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)

Ruang lingkup layanan dukungan perkantoran adalah lingkup Ditjen PDSPKP, yang terdiri dari: (1) Terselenggaranya gaji dan tunjangan untuk pembayaran belanja pegawai (2) Operasional dan pemeliharaan kantor.

Tabel 19. Ikhtisar Pencapaian Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	S.d TW I Tahun 2026			TW IV 2025	TW I 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)	3	12	3	12	3	12	3	3	100,00	25	-75,00	0

Capaian Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Ditjen PDSPKP pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 3 layanan. Capaian ini setara

dengan 100% terhadap target Triwulan I Tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 3 layanan, serta 25% terhadap target Tahun 2026 sebesar 12 layanan.

Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

- a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN Satker Pusat;
- b. Layanan Rumah Tangga dan Ketatausahaan;
- c. Pembayaran gaji PPNPN Satker Pusat;
- d. Pembayaran Gaji Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Satker Pusat;
- e. Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor Satker Pusat

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp3.158.947.000,- sampai dengan Bulan Maret 2026 dari pagu Rp14.663.541.000- atau setara dengan 23%.

17. Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)

Persentase permasalahan hukum yang ditangani Lingkup Ditjen PDSPKP adalah masalah yang timbul terkait dengan pelaksanaan tugas berkaitan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Kelautan dan Perikanan khususnya pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang kemudian dilakukan serangkaian tindakan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan dan pemberian bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Advokasi hukum meliputi bantuan hukum dan pembinaan hukum.

Tabel 20. Ikhtisar pencapaian Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	S.d TW I Tahun 2026			TW IV 2025	TW I 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2026 target persentase penyelesaian permasalahan hukum Lingkup Ditjen PDSPKP sebesar 100%. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2026. Oleh karena itu indikator kinerja ini belum dapat dibandingkan baik dengan target tahunan maupun dengan capaian triwulan sebelumnya pada tahun berjalan dan dengan capaian pada periode yang sama.

Pelayanan bantuan hukum yang ditangani oleh Ditjen PDSPKP pada Triwulan I meliputi:

1. Pendampingan Hukum terhadap Tim Teknis Ditjen PDSPKP dalam Pemeriksaan Saksi pada Sidang Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan/Penyelewengan dalam Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pabrik Tepung Ikan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2016.

Berdasarkan keseluruhan keterangan yang diterima oleh majelis hakim selama persidangan, majelis hakim mencermati adanya persepsi dalam pelaksanaan pengelolaan aset dan operasionalisasi pabrik tepung ikan yang menempatkan peran pemerintah daerah secara dominan, sehingga diperlukan penguatan mekanisme koordinasi, pengendalian, serta pengawasan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku pengguna anggaran guna memastikan tata kelola yang efektif dan akuntabel.

2. Pendampingan hukum untuk memenuhi pemanggilan dari Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya

Berdasarkan surat dari Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Nomor B/63/I/RES.3.3/2026/Ditreskrimsus tanggal 13 Januari 2026 perihal Permintaan Dokumen terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Konstruksi Prasarana Dan Sarana Di Luar Kawasan Pelabuhan SKPT Moa (Pasar Ikan Tiakur) pada Biro Umum Setjen di Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2023 Timja Hukum dari Setditjen PDSPKP melaksanakan pendampingan hukum Penyerahan dokumen dan penyampaian keterangan dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim Teknis Pekerjaan Konstruksi dari KKP di ruang pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada tanggal 27 Januari 2026.



Gambar 28. Pendampingan hukum untuk memenuhi pemanggilan dari Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp13.635.000,- sampai dengan Bulan Maret 2026 dari pagu Rp 70.713.000- atau setara dengan 19%.

18. Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)

Sesuai dengan Permen KP No. 23 tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen kerja sama adalah dokumen formal pengikatan hukum terhadap rencana kerja sama dengan mitra kerja sama baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dilaksanakan oleh Ditjen PDSPKP.

Terdapat 2 bentuk dokumen kerjasama di KKP yaitu dokumen kerja sama nasional/antar lembaga dan internasional. Ada beberapa jenis kerja sama yaitu kerja sama antar Lembaga, kerja sama bilateral, kerja sama regional dan multilateral.

Persentase dokumen kerjasama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP adalah persentase dokumen kerjasama yang diterima/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP. Dokumen yang diterima oleh Ditjen PDSPKP adalah dokumen usulan kerja sama yang dibedakan berdasarkan bentuk dokumen kerja samanya sedangkan Dokumen yang ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP adalah dokumen hasil kegiatan implementasi yang dibedakan berdasarkan kerangka kerja samanya.

Tabel 21. Ikhtisar Pencapaian Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	S.d TW I Tahun 2026			TW IV 2025	TW I 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindak lanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator Tingkat Persentase Dokumen Kerjasama yang Disusun/Ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP tahun 2026 ditargetkan 80. Indikator ini bersifat tahunan sehingga capaiannya akan dihitung pada akhir tahun 2026.

Selama bulan Januari – Maret 2026, Setditjen PDSPKP telah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja ini antara lain sebagai berikut:

- a. Kesepakatan Kerjasama Internasional Lingkup Ditjen PDSPKP;
 - 1) Mengikuti Rapat Penyusunan SOP Tahapan Inspeksi Implementasi IJ-EPA tanggal 5 Januari 2026;
 - 2) Rapat Koordinasi Persiapan Akses OECD Lingkup KKP tanggal 5 Januari 2026;

- 3) Mengikuti Sosialisasi Tarif Preferensi Indonesia Japan Economic Partnership Agreement Tuna Cakalang Tongkol tanggal 12 Januari 2026;
- 4) Mengikuti Rapat Pembahasan Persiapan Kegiatan Buyer Mission 2026 tanggal 13 Januari 2026;
- 5) Mengikuti Rapat Interkementerian Pembahasan Counterdraft MOU RI – Angola tanggal 13 Januari 2026;
- 6) Mengikuti Rapat Pembahasan Counterdraft MOU RI – Brunei Darussalam tanggal 14 Januari 2026;
- 7) Pelaksanaan *Steering Committee Meeting* tanggal 15 Januari 2026;
- 8) Mengikuti Rapat Finalisasi Penyusunan SOP IJEPA tanggal 20 Januari 2026;
- 9) Mengikuti Rapat Pembahasan Counter Draft Joint Communiqué on Cooperation to Promote Sustainable Fisheries Governance and to Combat Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand tanggal 21 Januari 2026;
- 10) Rapat Asistensi Pengisian Kuesioner SEAFDEC tanggal 22 Januari 2026;
- 11) Menyelenggarakan *Steering Committee Meeting (SCM) Hibah Global Quality Support Programm (GQSP)* UNIDO tanggal 22 Januari 2026;



Gambar 29. SCM Hibah GQSP UNIDO

- 12) Mengikuti Rapat Persiapan *Fact Finding Mission Import Promotion Desk-Germany* tanggal 29 Januari 2026;
- 13) Mengikuti Rapat Pertemuan dengan *Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (MAFF), Ministry of Foreign Affairs of Japan*

- (MOFA), dan *The Customs and Tariff Bureau (CTB) of Japan's Ministry of Finance* tanggal 3 Februari 2026;
- 14) Mengikuti Rapat Pembahasan Permintaan Informasi DG MARE terkait tindakan IUUF oleh Vietnam di perairan Indonesia tanggal 3 Februari 2026;
- 15) Mengikuti Rapat Pembahasan implementasi penerbitan non-manipulation document tanggal 4 Februari 2026;
- 16) Mengikuti Rapat persiapan *Foreign Buyer Mission* tanggal 5 Februari 2026;
- 17) Mengikuti Rapat Pembahasan Usulan Pembentukan *Technical Working Group (TWG)* Indonesia – Uni Eropa tanggal 10 Februari 2026;
- 18) Rapat Mingguan *Ocean Impact Summit* tanggal 10 Februari 2026;
- 19) Rapat Pembahasan Revisi Proposal *Proyek Blue Halo S* tanggal 13 Februari 2026;
- 20) Mengikuti Rapat Pembahasan Posisi Indonesia untuk *Working Group on Agrifood dan Technical Working Group (TWG) on Anmil, Fish and Plant Health Issues RI-Uni Eropa (UE)* tanggal 19 Februari 2026;
- 21) Rapat Pembekalan Komisi Audit IJEPA tanggal 19 Februari 2026;
- 22) Mengikuti Pembahasan Penyusunan Tanggapan atas Surat dari Kedubes Rusia dan Tindak Lanjut Kerja Sama Bilateral Bidang Infrastruktur Maritim dan Konektivitas antara Indonesia dan Rusia untuk Sub-Working Group II dan III tanggal 20 Februari 2026;
- 23) Mengikuti Pembahasan Penyempurnaan Rancangan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Implementasi Protokol Perubahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Indonesia Japan Economic Partnership Agreement/IJEPA*) pada sektor Kelautan dan Perikanan tanggal 20 Februari 2026;
- 24) Mengikuti Rapat Koordinasi IJEPA tanggal 20 Februari 2026;
- 25) Rapat Pembahasan *Counterdraft MoU on Marine and Fisheries RI-Mesir* dan PoA tanggal 27 Februari 2026;

26)Rapat Masukan KKP Terhadap Usulan Program dan Deliverable Kerja Sama Maritim RI-Rusia tanggal 2 Maret 2026;

27)Monitoring dan Evaluasi Lapang Proyek GQSP di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 2-4 Maret 2026:



Gambar 30. Monev Lapang Proyek Hibah GQSP UNIDO di Kabupaten Gunung Kidul

28)Monitoring dan Evaluasi Lapang Proyek GQSP di Karawang, ProVinsi Jawa Barat tanggal 4 Maret 2026



Gambar 31. Monev Lapang Proyek Hibah GQSP UNIDO di Kabupaten Karawang

29)Mengikuti rapat pembahasan kerja sama dengan Sri Lanka (6 Maret 2026).

30)Rapat Konsultasi *Regional Conference for Asia and the Pacific* (APRC) tanggal 10 Maret 2026;

31)Rapat Pengisian Kuesioner SEAFDEC publication "*The Southeast Asian State of Fisheries and Aquaculture* (SEASOFIA) 2027" tanggal 12 Maret 2026;

32)Pertemuan dengan JICA (16 Maret 2026);

b. Kesepakatan Kerjasama Antarlembaga Lingkup Ditjen PDSPKP;

- 1) Melaksanakan Rapat Pembahasan Amandemen PKS antara Ditjen PDSPKP KKP dengan Ditjen Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum tanggal 3 September 2025;
- 2) Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI)
- 3) Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan PERWARI;
- 4) Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan PT. Penanaman Nasional Madani (PT. PNM);



Gambar 32. Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan PT. Penanaman Nasional Madani

- 5) Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Berikan Protein Initiative;
- 6) Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Yayasan *World Wildlife Fund* (WWF) Indonesia
- 7) Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan PT. Bank Negara Indonesia Tbk;
- 8) Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Konsorsium Pesisir, Kelautan, dan Perbatasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (KPKP-PTMA)
- 9) Implementasi Kegiatan Kerja Sama Ditjen PDSPKP dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.



Gambar 33. Rapat Koordinasi dengan Deputi Bidang Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selain melaksanakan implementasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra, Ditjen PDSPKP juga aktif dalam pembahasan Nota Kesepahaman/Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan beberapa mitra antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembahasan Draft Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Keuangan tanggal 8 Januari 2026;
- 2) Menghadiri pembahasan Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Tentara Nasional Indonesia tanggal 3 Februari 2026;
- 3) Mengikuti pembahasan Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Badan Siber dan Sandi Negara tanggal 28 Januari 2026;
- 4) Mengikuti pembahasan Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan PT. Perusahaan Listrik Negara; tanggal 28 Januari 2026;
- 5) Mengikuti pembahasan awal Perjanjian Kerja Sama antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Penyediaan Produk Perikanan dan Distribusi Ikan Dalam Rangka Mendukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 16 Maret 2026;
- 6) Mengikuti pembahasan kedua Perjanjian Kerja Sama antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang Penyediaan Produk Perikanan dan Distribusi Ikan Dalam Rangka Mendukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 31 Maret 2026;



Gambar 34. Rapat Pembahasan PKS antara KKP dan POLRI

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp114.314.000,- sampai dengan Bulan Maret 2026 dari pagu Rp 679.353.000- atau setara dengan 18%.

19. Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), setiap Kementerian / Lembaga wajib menyediakan dan melayani informasi publik secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab. Pemberitaan tentang Ditjen PDSPKP adalah penyampaian informasi/cerita/keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan Ditjen PDSPKP. Pemberitaan negatif adalah informasi/cerita/keterangan dalam bentuk artikel yang mengandung sentimen negatif. Media massa yang dihitung adalah media cetak dan online yang telah terdaftar pada Dewan Pers Indonesia.

Rasio ini digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur persepsi publik dan kualitas pemberitaan terhadap Ditjen PDSPKP, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan komunikasi publik dan strategi kehumasan.

Tabel 22. Ikhtisar Pencapaian Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Target				Realisasi				% Realisasi Terhadap Target TW I	% Realisasi s.d TW I Terhadap Target 2026	% Pertumbuhan Terhadap Realisasi	
	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	Tahun 2026	TW I 2026	TW IV 2025	TW I 2025	S.d TW I Tahun 2026			TW IV 2025	TW I 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	<5	<5	<5	<5	1	0	0	1	120	120	120	120

Capaian Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan pada Triwulan I Tahun 2026 adalah sebesar 1. Capaian ini setara dengan 120% terhadap target Triwulan I Tahun 2026 yang ditetapkan sebesar <5, serta 120% terhadap target Tahun 2026 sebesar <5. Jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya (TW IV 2025) sebesar 1, maka capaian Triwulan I Tahun 2026 berada pada tingkat yang sama. Demikian pula, jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya (TW I 2025) sebesar 0, maka capaian Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan adanya peningkatan. Dengan demikian, capaian Triwulan I Tahun 2026 tetap berada diatas target yang ditetapkan, sekaligus menunjukkan konsistensi dalam pengendalian pemberitaan negatif.

Mengacu kepada data di atas menunjukkan bahwa selama Triwulan I terdapat 1 berita dengan tone negatif untuk bidang PDSPKP terkait dengan isu penggunaan ikan sapu sapu untuk olahan siomay ikan. Sehingga capaian rasio jumlah pemberitaan negatif bidang PDSPKP terhadap total pemberitaan sektor KP pada Triwulan I tahun 2026 adalah sebesar 0,72%. Nilai ini setara dengan 100% terhadap target Triwulan 1 tahun 2026 yaitu <5%.

Dalam rangka mempertahankan capaian positif tersebut dan memperkuat citra bidang PDSPKP di ruang publik, Sekretariat Ditjen PDSPKP telah melaksanakan sejumlah kegiatan sebagai berikut:

a. Penyebaran Narasi Positif secara Masif di Media Sosial

Melalui kanal resmi media sosial Ditjen PDSPKP (Instagram, Facebook, X, Tiktok dan Youtube), dilakukan publikasi rutin untuk memperkuat citra positif sektor kelautan dan perikanan khususnya bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Konten yang diunggah menyoroti keberhasilan program dan kegiatan, kegiatan lapangan, data capaian kinerja dan informasi seputar penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Secara keseluruhan, kinerja media sosial menunjukkan dinamika yang beragam, dengan Instagram tetap menjadi kanal utama, sementara TikTok mulai menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan jangkauan dan engagement.



Gambar 35. Penyebaran Narasi Positif secara Masif di Media Sosial

b. Pembuatan dan Penyebaran Siaran Pers

Pada periode Januari – Maret 2026, kegiatan penyebarluasan pemberitaan terkait Ditjen PDSPKP dilaksanakan secara intensif melalui penerbitan siaran pers, kegiatan liputan media, serta penyediaan template

pemberitaan yang dimanfaatkan oleh berbagai media massa nasional. Sepanjang periode tersebut, sejumlah isu strategis berhasil diangkat, antara lain penguatan sertifikasi halal produk perikanan, fasilitasi ekspor tuna dengan tarif 0% ke Jepang, penyusunan regulasi untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan, hingga penguatan sistem rantai dingin di Kampung Nelayan Merah Putih. Setiap rilis yang diterbitkan memperoleh perhatian luas dari media arus utama, baik cetak maupun daring, yang ditunjukkan dengan tingginya jumlah publikasi ulang di berbagai platform media nasional.

Selain itu, pemberitaan juga didukung oleh kegiatan konferensi pers dan peliputan langsung yang mengangkat isu-isu aktual seperti kesiapan stok dan stabilitas harga ikan menjelang Ramadan, penguatan akses pasar melalui business matching UMKM perikanan, serta peningkatan nilai produk perikanan di pasar internasional. Memasuki bulan Maret, fokus pemberitaan turut mencakup penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan pengelolaan gudang beku serta pengakuan akurasi laboratorium produk perikanan. Secara keseluruhan, strategi diseminasi informasi yang dilakukan mampu memperluas jangkauan publikasi, memperkuat citra positif institusi, serta memastikan pesan-pesan kebijakan dan program Ditjen PDSPKP tersampaikan secara efektif kepada masyarakat luas melalui berbagai kanal media.



Gambar 36. Pembuatan dan Penyebaran Siaran Pers

c. Pembuatan dan Penayangan Materi Video

Ditjen PDSPKP secara berkelanjutan mengembangkan berbagai materi video informatif dan inspiratif yang menampilkan potensi produk, profil pelaku usaha, serta beragam inovasi di bidang kelautan dan perikanan. Konten video ini dirancang tidak hanya sebagai media diseminasi informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan penguatan citra sektor kelautan dan perikanan kepada masyarakat luas. Penyebarluasan dilakukan secara optimal melalui berbagai kanal, meliputi media sosial resmi, kanal YouTube Ditjen PDSPKP, serta platform Neptune TV yang dapat diakses melalui Biznet IPTV, IndiHome TV, Vidio, dan YouTube, sehingga mampu menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam.

Selama periode pelaporan, Ditjen PDSPKP juga berhasil memproduksi satu film dokumenter yang mengangkat kisah sukses pelaku UMKM olahan otak-otak ikan di Muara Baru. Film ini menggambarkan perjalanan usaha, proses produksi, hingga strategi pengembangan bisnis yang dilakukan, sekaligus menunjukkan peran dukungan pemerintah dalam mendorong peningkatan nilai tambah produk perikanan. Kehadiran dokumenter ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pelaku usaha lainnya serta memperkuat narasi positif mengenai potensi dan daya saing sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

d. Pelaksanaan Layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

Ditjen PDSPKP secara konsisten menyelenggarakan layanan keterbukaan informasi publik yang cepat, responsif, dan akuntabel dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Layanan ini mencakup pemberian klarifikasi, tanggapan, serta pemenuhan permohonan informasi secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui optimalisasi peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Ditjen PDSPKP terus berupaya memastikan bahwa setiap informasi publik dapat diakses dengan mudah, tepat waktu, dan transparan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi.

Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, pada tahun 2025 Ditjen PDSPKP telah mengikuti kegiatan Monitoring dan

Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan berhasil meraih kategori “Informatif” sebagai kategori tertinggi dalam penilaian tersebut. Selain itu, PPID Ditjen PDSPKP juga memperoleh penghargaan sebagai PPID Terbaik II pada lingkup Eselon I KKP. Capaian ini mencerminkan kualitas pengelolaan informasi publik yang semakin baik serta komitmen berkelanjutan dalam menghadirkan layanan informasi yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan prima.

e. Pendokumentasian Kegiatan Sebagai Bahan Publikasi dan Konten Digital

Ditjen PDSPKP secara sistematis melaksanakan pendokumentasian seluruh kegiatan, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai bagian dari strategi komunikasi publik yang terintegrasi. Kegiatan dokumentasi ini mencakup pengambilan foto, video, serta pencatatan narasi kegiatan yang kemudian diolah menjadi berbagai materi publikasi digital. Hasil dokumentasi dimanfaatkan untuk memperkaya konten di berbagai kanal komunikasi, termasuk media sosial, website resmi, serta platform digital lainnya, sehingga mampu menyampaikan informasi kegiatan secara aktual dan menarik kepada masyarakat.

Selain sebagai bahan publikasi, dokumentasi kegiatan juga berfungsi sebagai arsip komunikasi publik yang mendukung aspek akuntabilitas dan keterbukaan informasi lembaga. Dengan pengelolaan dokumentasi yang baik, Ditjen PDSPKP dapat memastikan ketersediaan data dan informasi yang akurat serta mudah diakses untuk berbagai kebutuhan, baik internal maupun eksternal. Hal ini sekaligus memperkuat keberlanjutan produksi konten positif dan konsistensi penyampaian pesan kelembagaan kepada publik.

Tabel 23. Rekapitulasi Jumlah Pemberitaan Ditjen PDSPKP Berdasarkan Tone Pemberitaan

Bulan	Sifat/Tendensi Pemberitaan			Total
	Positif	Negatif	Netral	
Januari	30	1	10	41
Februari	36	0	12	48
Maret	41	0	9	50
Total	107	1	31	139

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini, Setditjen PDSPKP telah merealisasikan anggaran sebesar Rp58.233.000,- sampai dengan Bulan Maret 2026 dari pagu Rp247.099.000- atau setara dengan 24%.

C. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2026, Alokasi anggaran Sekretariat Ditjen Penguatan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan yang dikelola (pagu anggaran awal) adalah sebesar Rp109.223.854.000,- (Seratus sembilan miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang seluruhnya merupakan APBN rupiah murni dengan realisasi sebesar Rp31.990.207.000,- (Tiga puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh ribu rupiah) setara dengan 29,29% terhadap pagu awal.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara umum Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal PDSPKP Triwulan I Tahun 2026 telah menyajikan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja kegiatan yang baik dengan ditunjukkan nilai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,96% yang termasuk dalam kategori “Istimewa”.

Namun demikian upaya perbaikan peningkatan kinerja tetap akan dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh jajaran Sekretariat Ditjen PDSPKP antara lain melalui perencanaan dan penganggaran yang baik, ketatalaksanaan yang efisien, pengembangan dan pembinaan SDM yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan budaya kerja yang baik dan pelaporan yang tertib, sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan kebijakan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Ditjen PDSPKP.

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja Setditjen PDSPKP Triwulan I Tahun 2026, seluruh indikator kinerja Sekretariat Ditjen PDSPKP yang penghitungannya dilakukan secara triwulanan dan semesteran telah mencapai target.

C. Tindaklanjut atas Rekomendasi Pada Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja Setditjen PDSPKP Triwulan IV tahun 2025, seluruh indikator kinerja kegiatan yang penghitungannya dilakukan secara triwulanan dan semesteran telah mencapai target.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Setditjen PDSPKP Tahun 2026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Machmud**

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Machmud**

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA,
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan

PIHAK PERTAMA,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Penguatan Daya Saing Produk Kelautan
dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Machmud



Ditandatangani
Secara Elektronik

Machmud

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	86
		2.	Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LK Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	≤0,5
		3.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	82
		4.	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	77
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	86,2
		6.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	92,1
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	81,75
		8.	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	3,6
		9.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Indeks)	81,5
		10.	Persentase penyelesaian program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	100
		11.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	81
		12.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	77

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
		13.	Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan 3 serta SOP Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	85
		14.	Nilai Proposal Inovasi Pelayanan Publik Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Nilai)	78
		15.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Data Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	92
		16.	Pemenuhan Layanan Perkantoran Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Layanan)	12
		17.	Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP (Persen)	100
		18.	Persentase Dokumen Kerja sama yang disusun/ditindaklanjuti oleh Ditjen PDSPKP (Persen)	80
		19.	Rasio Jumlah Pemberitaan Negatif Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terhadap Total Pemberitaan Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	≤5

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM : Dukungan Manajemen	
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PDSPKP	85.956.731.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2026	85.956.731.000

Jakarta, 6 Januari 2026

PIHAK KEDUA,
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Machmud

PIHAK PERTAMA,
Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan
Daya Saing Produk Kelautan dan
Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Machmud